

EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN PERIUK JAYA KECAMATAN PERIUK KOTA TANGERANG

Hayati Nufus¹, Khikmawanto²

Universitas Yuppentek Indonesia

¹hayatinufus69@gmail.com, ²Khikmawanto@uyi.ac.id

ABSTRACT

This research aims to evaluate the implementation of the Program Keluarga Harapan (PKH) in Periuk Jaya Sub district, Periuk District, Tangerang City, using descriptive qualitative research method involving observation, interviews, and data interpretation. Research informants include various stakeholders in the PKH implementation, including high-ranking officials such as the Head of the Tangerang City Social Office, the Coordinator of PKH in Tangerang City, and PKH beneficiaries. The research results indicate that the implementation of PKH in Periuk Jaya has achieved various levels of success, especially in improving the health and education quality of the beneficiaries, supported by their active participation. Despite changes in fund disbursement, efficiency can still be improved through better guidance. Issues regarding the adequacy of assistance and equitable distribution persist, emphasizing the importance of refining beneficiary selection. The positive response from the community towards PKH demonstrates its positive impact, although there is room for improvement. Overall, this research provides a comprehensive overview of the implementation of PKH in Periuk Jaya..

Key Words: Evaluasi, Kebijakan, PKH

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang melibatkan observasi, wawancara, dan interpretasi data. Informan penelitian melibatkan berbagai pihak terkait pelaksanaan PKH, termasuk pejabat tinggi seperti Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Kasie Jaminan Sosial dan Data Kota Tangerang, hingga peserta PKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kelurahan Periuk Jaya telah mencapai sejumlah tingkat keberhasilan terutama dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan peserta, didukung oleh partisipasi aktif mereka. Meskipun terdapat perubahan dalam pencairan dana, efisiensi masih bisa ditingkatkan melalui pendampingan yang lebih baik. Masih ada isu terkait kecukupan bantuan dan penyebaran yang merata, serta pentingnya merinci pemilihan penerima manfaat. Respons positif masyarakat terhadap PKH menunjukkan dampak positif, meskipun ada ruang untuk perbaikan. Keseluruhannya, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang pelaksanaan PKH di Kelurahan Periuk Jaya.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, PKH

PENDAHULUAN

Pembangunan memiliki hubungan erat dengan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan. Dalam upaya mencapai kesejahteraan tersebut, pemerintah perlu memperhatikan masalah kemiskinan karena hal ini tak terlepas dari pemenuhan kebutuhan hidup. Sebagaimana disebutkan dalam buku Psikologi Pendidikan (Purwanto, dkk. 2013), kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan kemiskinan menjadi fokus perhatian pemerintah karena dapat menjadi penyebab ketertinggalan dan hambatan dalam pembangunan. Guna menanggulangi isu kemiskinan dan merancang kebijakan perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia memperkenalkan Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian oleh Ida Syamsu Roidah (2016) menunjukkan bahwa Bantuan finansial yang disertai dengan syarat atau *Conditional Cash Transfers* (CCT)

telah sukses mengurangi tingkat kemiskinan di beberapa negara. PKH bertujuan untuk mendukung rumah tangga yang sangat miskin dalam menjaga daya beli mereka, terutama ketika terjadi penyesuaian harga bahan bakar minyak, serta membangun sistem perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan memutus rantai kemiskinan. Meskipun demikian, penelitian (Yustina, Dr. Mappamiring, dan Sitti Rahmawati Arfah. 2023) menunjukkan bahwa Evaluasi terhadap Program Keluarga Harapan di Kelurahan Periuk Jaya menunjukkan bahwa belum mencapai keberhasilan sepenuhnya. Dari enam indikator evaluasi, hanya responsivitas, efektivitas, dan ketepatan yang telah memenuhi standar. Namun, efisiensi, pemerataan, dan kecukupan masih belum mencapai standar yang diharapkan. Data Dinas Sosial Kota Tangerang (2023) menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah anggota KPM, persentase keberhasilan PKH mengalami fluktuasi, terutama pada tahun 2018 yang dipengaruhi oleh pemilihan umum presiden. Penelitian oleh Shabrilla Permata Ediasuti (2023) menegaskan bahwa PKH dapat memberikan manfaat yang signifikan jika dilaksanakan dengan baik. Namun, observasi awal di Kelurahan Periuk Jaya menunjukkan bahwa dari total penerima bantuan sosial, hanya sebagian yang dianggap layak. Acuan pelaksanaan PKH di Kota Tangerang diatur dalam Perda Kota Tangerang No. 1 Tahun 2019, yang menekankan pentingnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik, material, dan mental spiritual. Menghadapi hasil observasi awal di Kelurahan Periuk Jaya, peneliti berencana untuk mengevaluasi pelaksanaan PKH dengan mempertimbangkan enam indikator evaluasi (Dunn, William N, 2003). Dengan latar belakang ini, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian berjudul "Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Periuk Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang."

TINJAUAN PUSTAKA

DEFINISI KEBIJAKAN PUBLIK

Dikutip dari Winarno (2007), ada banyak batasan atau definisi tentang konsep kebijakan publik dalam literatur ilmu politik. Setiap definisi menekankan aspek yang berbeda, yang dipengaruhi oleh latar belakang unik masing-masing ahli. Di sisi lain, Cara penjelasan kebijakan publik juga akan dipengaruhi oleh variasi dalam pendekatan serta model yang digunakan oleh para ahli.

EVALUASI KEBIJAKAN

Menilai efektivitas dan dampak kebijakan yang telah diterapkan merupakan suatu proses krusial dalam evaluasi kebijakan publik. Wholey (2010), sebagaimana dikutip, menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan harus mencakup analisis terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kebijakan tersebut. Wholey menyoroti pentingnya melibatkan seluruh siklus kebijakan guna memperoleh pemahaman yang holistik mengenai efektivitas dan dampaknya. Dalam pandangannya, evaluasi perlu dilaksanakan dengan pendekatan terstruktur dan memanfaatkan metode-metode ilmiah untuk mengukur kinerja kebijakan.

MODEL-MODEL EVALUASI KEBIJAKAN

Evaluasi program atau kebijakan publik memerlukan penetapan kriteria yang dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilannya. Kriteria-kriteria yang telah diformulasikan dapat berfungsi sebagai indikator untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Seperti yang disebutkan oleh Dunn (2003), ada enam tipe kriteria evaluasi kebijakan yang melibatkan aspek-aspek tertentu. Seperti berikut :

1. Efektivitas berkaitan dengan kemampuan suatu opsi untuk mencapai hasil yang diinginkan atau mencapai tujuan dari tindakan yang diambil. Secara khusus, efektivitas yang erat terkait dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari sudut pandang unit produk, layanan, atau nilai moneter yang dihasilkan.
2. Efisiensi berkaitan dengan jumlah upaya yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, yang sering dianggap sebagai sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah hubungan antara efektivitas dan usaha yang umumnya diukur dari segi biaya moneter.
3. Kecukupan berkaitan dengan sejauh mana tingkat efektivitas dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau standar yang mungkin menimbulkan masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara opsi kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Kesamaan erat kaitannya dengan aspek rasionalitas legal dan sosial, merujuk pada distribusi akibat dan upaya di antara kelompok-kelompok berbeda dalam masyarakat.
5. Responsivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
6. Ketepatan adalah kriteria yang erat terkait dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan satu kriteria individu, melainkan melibatkan dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

METODE

Penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif sehingga peneliti dapat mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang terjadi di Kelurahan Periuk Jaya. Selain itu, peneliti agar mendapatkan penjelasan secara menyeluruh peneliti menggali data melalui wawancara sehingga apa yang di amanatkan perda berjalan sesuai dengan seharusnya.

HASIL & PEMBAHASAN

Evaluasi Program Keluarga Harapan PKH di Kelurahan Periuk Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kolaborasi antara pemerintah yang dipimpin oleh Bappenas serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait seperti departemen sosial, kesehatan, pendidikan, komunikasi dan informasi, serta badan pusat statistik. PKH bertujuan memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sebagai upaya percepatan dalam mengurangi kemiskinan dengan fokus meningkatkan kualitas kesehatan bagi anak balita, ibu hamil, dan lansia, serta peningkatan kualitas pendidikan pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Kelurahan Periuk Jaya di Kota Tangerang adalah salah satu penerima manfaat PKH. Berikut merupakan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kelurahan Periuk Jaya mengacu pada indikator evaluasi kebijakan seperti yang dijelaskan dalam teori oleh Dunn (2003: 610), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, sebagai berikut:

1. Efektivitas

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan ditemukan salah satu contoh hasil dari efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kelurahan Periuk Jaya yaitu terdapatnya penambahan dan pengurangan jumlah peserta PKH pada periode 2020-2022 yang dapat dilihat seperti dibawah ini.

Tabel 1 Pertambahan Peserta PKH

Nama Kelompok	Pertambahan Peserta PKH 2020	Pertambahan Peserta PKH 2021	Pertambahan Peserta PKH 2022
Kelompok Jeruk 1 Kp. Pengasinan	5	-	-
Kelompok Jeruk 2 Kp. Periuk	9	-	-
Kelompok Jeruk 3 Kp. Sangiang	6	-	-
Kelompok Jeruk 4 Kp. Periuk Jaya Permai	7	-	-
Kelompok Jeruk 5 Kp. Bayur	8	-	-

Sumber: kantor dinas sosial 2022

Tabel 2 Pengurangan Peserta PKH

Nama	Pengurangan Peserta PKH 2020	Pengurangan Peserta PKH 2021	Pengurangan Peserta PKH 2022
Kelompok Jeruk 1 Kp. Pengasinan	-	10	8
Kelompok Jeruk 2 Kp. Periuk	4	7	3
Kelompok Jeruk 3 Kp. Sangiang	3	9	7
Kelompok Jeruk 4 Kp. Periuk Jaya Permai	2	4	2
Kelompok Jeruk 5 Kp. Bayur	-	2	5

Sumber: kantor dinas sosial 2022

Melalui kedua tabel di atas dapat diketahui bahwa meskipun terjadi fluktuasi jumlah peserta PKH di berbagai kelompok wilayah, masih terdapat upaya dari pihak penerima bantuan untuk tetap menjalankan kewajiban dan persyaratan program. Terlihat bahwa pada tahun-tahun di mana terjadi pengurangan peserta, sebagian besar kelompok wilayah masih mematuhi aturan dan mengurangi jumlah peserta sesuai dengan tuntutan program.

Oleh karena itu, penambahan dan pengurangan jumlah peserta PKH di Kelurahan Periuk Jaya dapat diartikan sebagai gambaran dinamika komitmen dan partisipasi peserta dalam efektivitas pelaksanaan program. Meskipun terdapat fluktuasi jumlah peserta dari tahun ke tahun, adanya peningkatan dan penurunan jumlah peserta menunjukkan adanya kesadaran dan usaha dari masyarakat dalam menjalankan program PKH.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kelurahan Periuk Jaya telah berjalan sebagaimana mestinya namun sayangnya masih saja ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu upaya lebih lanjut dalam memastikan pelaksanaan program yang efektif serta pembaruan data yang akurat demi mencapai tujuan PKH dalam mendukung rumah tangga sangat miskin di Kelurahan Periuk Jaya.

2. Efisiensi

Salah satu contoh dari hasil efisiensi yang ditemukan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Di Kelurahan Periuk Jaya ternyata Penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) diserahkan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan memenuhi persyaratan program pendidikan dan kesehatan. Verifikasi keikutsertaannya dilakukan melalui kepemilikan kartu PKH yang mencantumkan nama ibu atau wanita yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Kartu PKH diberikan kepada seluruh peserta PKH yang dapat dilihat seperti gambar di bawah ini.



Gambar 1 Bentuk Kartu Elektronik PKH

Dalam bentuk yang terlihat seperti pada Gambar di atas, Kartu Elektronik PKH menggantikan sistem lama yang mungkin lebih rumit dan memerlukan waktu serta tenaga lebih banyak dalam proses administrasi dan distribusi bantuan. Dengan menggunakan Kartu Elektronik PKH, proses identifikasi penerima manfaat menjadi lebih efisien. Penggunaan teknologi ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk memverifikasi dan mengelola data penerima bantuan. Selain itu, aspek biaya juga terkendali karena penggunaan teknologi dapat mengurangi biaya cetak dan distribusi yang mungkin lebih besar pada metode manual sebelumnya. Dengan begitu, sumber daya yang sebelumnya digunakan untuk hal-hal administratif yang kompleks kini dapat dialihkan untuk upaya lebih produktif, seperti pendampingan dan pelatihan bagi penerima manfaat. Pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan setiap tiga bulan, terbagi dalam empat tahap sepanjang tahun. Proses pencairan dilakukan di lembaga perbankan yang telah ditentukan oleh PKH. Saat ini, peserta PKH tidak lagi memerlukan pendamping untuk menerima dana karena setiap peserta sudah memiliki rekening ATM pribadi. Oleh karena itu, dalam setiap tahap pencairan, peserta dapat mengambil dana mereka sendiri tanpa melibatkan perantara. Adapun terdapat rincian

bantuan yang akan diterima oleh KPM selama menjadi peserta PKH yang dapat dilihat dalam tabel skenario bantuan PKH berikut ini:

Tabel 3 Skenario Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Skenario bantuan	Tahap pencairan	Bantuan per RTSM/KPM
Ibu hamil/nifas	Rp 750,000 x 4 kali	Rp 3,000,000
Anak usia 0 s.d 6 tahun	Rp 750,000 x 4 kali	Rp 3,000,000
Pendidikan anak SD/ sederajat	Rp 225,000 x 4 kali	Rp 900,000
Pendidikan anak SMP/ Sederajat	Rp 375,000 x 4 kali	Rp 1,500,000
Pendidikan anak SMA/ Sederajat	Rp 500,000 x 4 kali	Rp 2,000,000
Lanjut usia 70 tahun	Rp 600,000 x 4 kali	Rp 2,400,000
Penyandang disabilitas	Rp 600,000 x 4 kali	Rp 2,400,000
Tuberkulosis (TBC)	Rp 750,000 x 4 kali	Rp 3.000,000

Sumber: Kantor Dinas Sosial 2023

Detail bantuan yang akan diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH) di atas mencakup bentuk bantuan sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peserta PKH diharapkan untuk mengikuti ketentuan rincian dana tersebut saat menerima bantuan. Meskipun begitu para peserta PKH di Kelurahan Periuk Jaya masih saja mengalami ketidakpastian mengenai besaran dana yang diterima karena fluktuasi yang tidak menentu. Terutama selama pandemi, perubahan dalam frekuensi penerimaan bantuan juga terjadi, mengindikasikan adanya koordinasi yang perlu diperkuat antara program-program bantuan yang berjalan.

Dalam konteks ini, penting untuk meningkatkan transparansi, konsistensi, dan koordinasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Langkah-langkah ini akan membantu memastikan bahwa bantuan yang diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) berjalan lebih efisien dan efektif. Dalam hal ini, peran pemerintah pusat dan daerah serta komunikasi yang baik dengan penerima bantuan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesuksesan program PKH di Kelurahan Periuk Jaya.

3. Kecukupan

Melalui hasil tinjauan lapangan yang dilaksanakan oleh peneliti, terkait dengan indikator kecukupan dalam efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kelurahan Periuk Jaya, ditemukan bahwa terdapat isu signifikan dalam hal ini. Hasil terjun ke lapangan mengungkapkan bahwa bantuan yang diberikan kepada

masyarakat seringkali tidak mampu bertahan hingga jangka waktu yang diharapkan. Kendala ini menyebabkan bantuan yang diberikan tidak mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat penerima, dan dengan demikian, program ini belum mampu secara efektif mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi oleh rumah tangga sangat miskin di kelurahan tersebut. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas program dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat benar-benar memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat penerima program PKH.

4. Perataan

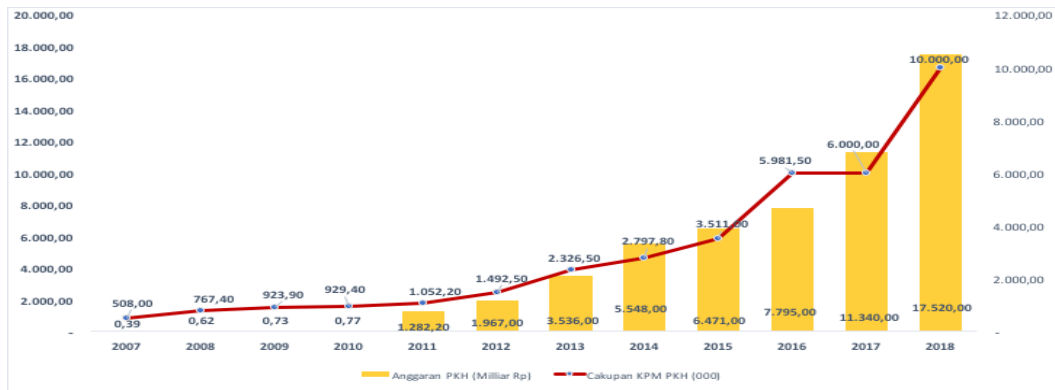
Berdasarkan observasi di lapangan, penelitian menunjukkan bahwa distribusi bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) masih belum merata, atau dengan kata lain, masih terdapat sejumlah masyarakat yang belum menerima manfaat dari program ini. Seperti gambar yang akan peneliti sajikan berikut ini.

Gambar 2 Data Penerima Bantuan Sosial di Kelurahan Periuk Jaya



Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa di Kelurahan Periuk Jaya masih terdapat Masyarakat yang tidak layak untuk menerima bantuan sosial sekitar 191 data dan adapun Masyarakat yang belum terdata untuk penerimaan bantuan sosial sekitar 100 total keseluruhan total penerimaan bantuan sosial Masyarakat Kelurahan Periuk Jaya yang menyentuh angka 1,731 data penerimaan bantuan sosial, yang dimana dari jumlah keseluruhan data bantuan sosial di Kelurahan Periuk Jaya. Demikian pula, terdapat bukti tambahan yang mengonfirmasi ketidakmerataan dalam implementasi bantuan PKH, yang tercermin dari jumlah keluarga yang tergolong sebagai keluarga prasejahtera, yang dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Gambar 3 Cakupan PKH Tahun 2007 s.d 2019



Sumber: Pedoman Pelaksanaan PKH 2020

Ketidakmerataan distribusi bantuan PKH sebagian besar disebabkan oleh konsep dasar dari program tersebut. PKH memiliki kriteria yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan, dan penyaluran tidak mencakup masyarakat yang masih dianggap miskin dalam aspek sosial ekonomi jika mereka tidak memenuhi syarat penerimaan berdasarkan RTSM. Meskipun mereka yang masih tergolong miskin memiliki akses ke program bantuan pemerintah lainnya, namun demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerataan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) masih belum merata sepenuhnya, dan banyak masyarakat yang sebenarnya memenuhi syarat belum menerima manfaat dari program ini.

5. Responsivitas

hasil observasi penelitian di lapangan menggambarkan tingkat responsivitas Masyarakat terhadap PKH di Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang sangat positif. Bantuan yang diberikan melalui PKH ini telah meraih dukungan yang kuat dari masyarakat, yang dengan tulus menerima manfaatnya. Hal ini mengindikasikan bahwa responsivitas yang positif ini adalah hasil dari kesesuaian program dengan kebutuhan nyata masyarakat kurang mampu di Kelurahan Periuk Jaya. Bantuan yang disalurkan melalui program ini telah memberikan kontribusi yang berarti dalam mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan serta layanan Kesehatan. Anak-anak yang merupakan penerima bantuan PKH juga mendapatkan dukungan tambahan dari sekolah masing-masing. Hal ini menghilangkan beban finansial orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengembangan potensi akademis dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa responsivitas terhadap pelaksanaan PKH di Kelurahan Periuk Jaya telah berjalan sesuai dengan tujuannya dan diharapkan pemerintah untuk terus konsisten dalam pelaksanaannya.

6. Ketepatan

Ketepatan memiliki hubungan yang erat dengan rasionalitas substansial, karena pertanyaan mengenai ketepatan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan satu kriteria individu, tetapi melibatkan lebih dari dua kriteria secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya di lapangan peneliti menemukan bahwa ketepatan program keluarga harapan ini sudah tepat karena dalam menentukan peserta melalui banyak tahap dan harus mengikuti komponen-komponen yang telah ditentukan dan bantuan ini berguna bagi mereka yang menerima bantuan.

Lebih lanjut, perihal ketepatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Periuk Jaya tidak lepas dari penekanan yang diberikan pada proses seleksi penerima manfaat PKH. Tidak hanya satu kriteria yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat, tetapi melalui banyak tahap dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima manfaat. Hal ini mencerminkan pendekatan rasionalitas substantif, di mana kebijakan ini didesain untuk mempertimbangkan berbagai aspek dan faktor yang berkaitan dengan kebutuhan dan kelayakan penerima manfaat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Periuk Jaya, dapat disimpulkan bahwa program ini efektif dalam mencapai tujuannya, terutama dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak serta ibu hamil. Kesungguhan peserta dan dukungan dari pendamping menjadi faktor utama kesuksesan program ini. Meskipun program mengalami perubahan signifikan dalam pencairan dana, terdapat potensi untuk meningkatkan efisiensi dengan pendampingan yang lebih baik.

Respons positif masyarakat terhadap PKH karena dampak nyata dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Program ini telah membantu meringankan beban finansial keluarga penerima. Pendekatan rasionalitas dalam pemilihan penerima manfaat menunjukkan pertimbangan holistik. Secara keseluruhan, PKH di Kelurahan Periuk Jaya telah berhasil mencapai tujuannya, tetapi perlu peningkatan untuk menjalankannya lebih efisien, efektif, merata, dan memberikan dampak jangka panjang yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Wirarno (2007), *Kebijakan Publik Teori dan Praktek*, KAPI. Hlm. 16-19
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press, hlm. 610.
- Dehani, M. (2018). *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor*. Jurnal Governansi, volume 4 nomer 1. Hlm. 49-54.

- Hayati Nufus. (2023). *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Periuk Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang*, Skripsi, Universitas Yuppentek Indonesia
- Kiki Debi Sintia. 2016. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6. Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. Hlm. 89-92.
- Purwanto. (2013). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT. Raja Rosdakarya.
- Pedoman *Program Keluarga Harapan* (2023). Hlm 22-24
- Perda Tangerang no 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga pada pasal 4 poin a.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Bisnis: Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta. hlm.157-166.
- Shabrilla Permata Ediasuti, (2023). *Strategi Komunikasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Kota Tangerang*. Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi. Hlm. 3
- Weiss, C. H. (1998). *Evaluation Research: Methods for Assessing Program Effectiveness*. Prentice Hall. Hlm. 101-106.